



Komisi Pemberantasan Korupsi

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Jl. Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi
Jakarta 12950

TANDA TERIMA
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Atas Nama : PRASETYA PUJI RAHARJA
NIK : 3515130801820004
Lembaga : MAHKAMAH AGUNG
Unit Kerja : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA
Sub Unit Kerja : PENGADILAN AGAMA SURABAYA
Jabatan : SEKRETARIS
Jenis Laporan : Periodik - 2025
Tanggal Kirim : 5 Januari 2026

Catatan:

Tanda Terima ini diberikan sebagai bukti bahwa Penyelenggara Negara telah memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN.



Direktorat PP LHKPN | Call Center: 198 | email: elhkpn@kpk.go.id | <https://elhkpn.kpk.go.id>

Email ini dikirim secara otomatis oleh sistem e-LHKPN dan anda tidak perlu membalas email ini.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 5 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **PRASETYA PUJI RAHARJA**
2. Jabatan : **SEKRETARIS**
3. NHK : **511167**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/150 m2 di KAB / KOTA SIDOARJO, HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	112.000.000
1. MOBIL, SUZUKI ERTIGA MINIBUS Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000		
2. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 12.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	1.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	2.000.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.415.500.000
III. HUTANG	Rp.	1.096.727.995
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	318.772.005

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

**Direktorat Jenderal
Pajak**

Layanan Informasi &
Pengaduan: (021) 1500200
informasi@pajak.go.id
pengaduan@pajak.go.id

**BUKTI PENERIMAAN ELEKTRONIK
(BPE)**

Nomor : **BPE-**
BPE **25491/CT/KPP.2401/2026**
Tanggal : 19 Februari 2026

NPWP : 3515130801820004
Nama : PRASETYA PUJI
Wajib RAHARJA, SH, MH
Pajak

Jenis SPT : SPT Tahunan PPh Wajib
Pajak Orang Pribadi
Tahun : 2025
Pajak

Masa : Januari - Desember 2025
Pajak

Status SPT : Normal
Saluran : Portal Wajib Pajak
Tanggal : 19 Februari 2026
Terima :
SPT

Dokumen ini diterbitkan secara elektronik
oleh Coretax DJP dan sah sebagai Bukti
Penerimaan Elektronik. Tidak memerlukan
tanda tangan basah.

*Terima kasih telah menggunakan layanan
digital DJP. SPT Anda telah tercatat dan
diterima dengan baik.*

Mohon simpan email ini sebagai arsip pribadi Anda.